

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek/Objek Penelitian

D.I. Yogyakarta merupakan daerah dengan luas 3.2 ribu km². Secara administratif D.I. Yogyakarta terdiri dari 1 kota madya dan 4 kabupaten. Masing-masing daerah memiliki daya tarik yang berbeda-beda karena memiliki beragam potensi dan budaya. Salah satu masalah dalam pembangunan antara kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta adalah pembangunan yang tidak merata. Selain dikarenakan perbedaan potensi daerah, hal tersebut juga dikarenakan perbedaan kemampuan pembangunan fiskal dan kebijakan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemda D.I. Yogyakarta dari tahun 2003-2014. Subjek penelitian ini adalah setiap kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta di mana terdapat 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Provinsi D. I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Variabel penelitian dalam penelitian ini antara lain kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, efektivitas pad, alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah sampel sebanyak 60 sampel.

B. Uji Kualitas Instrumen

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini memiliki lima variabel antara lain kemandirian daerah (KD), ketergantungan keuangan (KK), efektivitas PAD (EPAD), alokasi belanja modal (ABM), dan pertumbuhan ekonomi (PE). Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat, berikut ini disajikan deskripsi data mengenai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang telah diolah dengan program *SPSS 22*:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KD	60	5,0301	70,9095	17,909880	13,9914667
KK	60	45,4680	94,1537	79,985390	12,0723148
EPAD	60	88,1021	176,3520	115,979445	17,3299343
ABM	60	4,5244	28,9606	13,205827	4,3979172
PE	60	3,7891	35,3279	12,215810	4,7749658
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kemandirian daerah memiliki nilai minimal 5,0301 dan nilai maksimal 70,9095 dengan nilai rata-rata 17,909880 dan standar deviasi 13,9914667. Kabupaten yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2007, sementara yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Yogyakarta pada tahun 2015. Semakin tinggi presentase rasio kemandirian maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memenuhi

kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2007).

Nilai rata-rata ketergantungan keuangan kabupaten/kota D.I.Yogyakarta tahun 2003-2014 adalah sebesar 79,985390 dengan nilai berkisar antara 45,4680–94,1537 dan standar deviasi 12,0723148. Kabupaten yang memiliki nilai terendah adalah Kota Yogyakarta tahun 2014 dan kabupaten yang memiliki nilai tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2006. Semakin tinggi angka rasio ini maka ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat juga relatif tinggi (Halim, 2007). Dengan melihat nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta masih bergantung terhadap pemerintah provinsi dengan presentase yang relatif tinggi.

Nilai rata-rata efektivitas PAD kabupaten/kota D.I. Yogyakarta tahun 2003-2014 adalah sebesar 115,97944 dengan nilai berkisar antara 88,1021 - 176,3520 dan standar deviasi 17,3299343. Kabupaten yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 dan kabupaten yang memiliki nilai tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014. Nilai rata-rata sebesar 110,56639 memiliki arti bahwa kemampuan kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sangat efektif dalam merealisasikan PAD dibanding target yang telah ditentukan.

Nilai rata-rata alokasi belanja modal kabupaten/kota D.I. Yogyakarta tahun 2003-2014 adalah sebesar 13,205827 dengan nilai berkisar antara 4,5244-28,9606 dan standar deviasi 4,3979172. Kabupaten yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 dan kabupaten yang memiliki nilai tertinggi

adalah Kabupaten Bantul tahun 2008. Kontribusi alokasi belanja modal akan terlihat pada pembangunan daerah, karena dengan belanja modal akan mewujudkan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan dan rumah sakit. Oleh sebab itu, alokasi belanja modal yang memadai akan berdampak pada terpenuhinya infrastruktur daerah.

Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota D.I. Yogyakarta tahun 2003-2014 adalah sebesar 12,215810 dengan nilai yang berkisar antara 3,7891-35,3279 dan standar deviasi 4,7749658. Kabupaten yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dan kabupaten yang memiliki nilai tertinggi adalah Kabupaten Bantul tahun 2015.

2. Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah model persamaan dalam penelitian ini:

$$\text{Persamaan 1: } ABM = \beta_2 \text{ KD} - \beta_2 \text{ KK} + \beta_2 \text{ EPAD} + \varepsilon$$

$$\text{Persamaan 2: } PT = \beta_1 \text{ KD} - \beta_1 \text{ KK} + \beta_1 \text{ EPAD} + \beta_3 \text{ BM} + \varepsilon$$

a. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan 1

1) Uji Normalitas

$$\text{Persamaan 1: } ABM = \beta_2 \text{ KD} - \beta_2 \text{ KK} + \beta_2 \text{ EPAD} + \varepsilon$$

Tabel 4.2
Uji Normalitas Persamaan 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,30705929
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077
	Negative	-,053
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp sig* 0,200 lebih besar dari signifikansi sebesar 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas Persamaan 1

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	22,740	14,186		1,603	,115			
KD	-,107	,091	-,340	-1,173	,246	,204	4,906	
KK	-,119	,118	-,326	-1,003	,320	,163	6,152	
EPAD	,016	,042	,064	,383	,703	,622	1,607	

a. Dependent Variable: ABM

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan keseluruhan nilai VIF variabel Kemandirian Daerah,

Ketergantungan Keuangan, dan Alokasi Belanja Modal di atas 0,10 (>10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan 1 tidak mengalami gangguan multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi Persamaan 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,202 ^a	,041	-,010	4,4209219	1,300

a. Predictors: (Constant), EPAD, KD, KK

b. Dependent Variable: ABM

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,300. Nilai tersebut di antara -2,5 dan 2,5 maka dapat disimpulkan bahwa pengujian persamaan 1 bebas dari masalah autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,435	8,266		1,746	,086
	KD	-,083	,053	-,449	-1,564	,123
	KK	-,080	,069	-,374	-1,162	,250
	EPAD	-,027	,025	-,181	-1,100	,276

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, hasil pengujian heteroskedastisitas melalui uji *Glejser* yang menunjukkan nilai signifikansi masing-masing

variabel independen lebih besar dari 0,05 (>5%). Dengan demikian dapat disimpulkan persamaan 1 yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung gangguan heteroskedastisitas.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan 2

1) Uji Normalitas

$$\text{Persamaan 2: } PT = \beta_1 \text{ KD} - \beta_1 \text{ KK} + \beta_1 \text{ EPAD} + \beta_3 \text{ BM} + \varepsilon$$

Tabel 4.6
Uji Normalitas Persamaan 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,14482962
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,088
Test Statistic		,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,016 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil pengujian normalitas memiliki nilai *Asymp sig* 0,016 yaitu kurang dari nilai sig 0,05 ($0,016 < 0,05$), maka hasil tersebut mengindikasikan bahwa data residual tidak berdistribusi normal karena nilai *Asymp sig* kurang dari 0,05 ($< 0,05$). Langkah yang tepat untuk mengobati gejala data yang tidak berdistribusi normal adalah dengan langkah LN pada variabel *Unstandardized Residual*.

Tabel 4.7
Uji Normalitas Persamaan 2 dengan LN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		LN_RES2
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,3704
	Std. Deviation	1,52689
Most Extreme Differences	Absolute	,164
	Positive	,121
	Negative	-,164
Test Statistic		,164
Asymp. Sig. (2-tailed)		,052 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS

Dari langkah yang telah dilakukan untuk menghilangkan gejala data residual tidak berdistribusi normal dalam persamaan ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp sig* sebesar 0,052. Dengan nilai *Asymp sig* 0,052 lebih dari 0,05 ($0,052 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam persamaan ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	26,231	14,088				1,862
KD	-,088	,090	-,258	-,985	,329	,199	5,027
KK	-,088	,116	-,223	-,761	,450	,160	6,263
EPAD	-,095	,041	-,345	-2,325	,024	,621	1,611
ABM	,428	,130	,394	3,300	,002	,959	1,043

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil pengujian multikolinearitas nilai VIF masing-masing variabel independen memiliki nilai di atas 0,10 ($> 0,10$). Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 2 dalam penelitian ini bebas dari gangguan multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,497 ^a	,247	,192	4,2929057	1,585

a. Predictors: (Constant), ABM, KD, EPAD, KK

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil pengujian autokorelasi pada persamaan 2 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,585. Nilai D-W tersebut di antara -2,5 dan 2,5. dengan kata lain pengujian persamaan 2 dalam penelitian ini dikatakan bebas autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,086	9,618		-,009	,993
KD	,004	,061	,016	,057	,954
KK	,016	,079	,062	,196	,845
EPAD	-,015	,028	-,086	-,537	,593
ABM	,251	,089	,363	2,834	,006

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hasil pengujian heteroskedastisitas nilai sig masing-masing variabel independen di atas 0,05 (>0,05) kecuali pada variabel ABM $0,006 < 0,05$ sehingga terdapat gangguan heteroskedastisitas.

Untuk mengatasi gejala tersebut adalah dengan cara LN pada variabel *Absolute Unstandardized Residual*.

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2 dengan LN

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,167	5,605		,387	,703
KD	,014	,041	,179	,347	,732
KK	,010	,050	,104	,198	,845
EPAD	-,021	,019	-,249	-1,113	,277
ABM	,025	,055	,096	,454	,654

a. Dependent Variable: LN_ABS_RES2

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, hasil pengujian heteroskedastisitas nilai sig masing-masing variabel independen di atas 0,05 ($>0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini bebas dari gangguan heteroskedastisitas.

3. Hasil Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti atas permasalahan yang telah dirumuskan. Jawaban sementara tersebut perlu diuji kebenarannya secara empiris. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

a. Hasil Uji Hipotesis Persamaan 1

1) Uji Kecocokan Model atau Koefisien Determinasi

Tabel 4.12
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,289 ^a	,083	,034	,34073

a. Predictors: (Constant), EPAD, KD, KK

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R²* sebesar 0,034 hal ini berarti 3,4% variasi alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD. Sedangkan sisanya (100%-3,4%) yaitu 96,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2) Uji t

Tabel 4.13
Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,051	3,614		,844	,402
KD	-,171	,119	-,335	-1,443	,155
KK	-,557	,515	-,274	-1,082	,284
EPAD	,498	,377	,200	1,320	,192

a. Dependent Variable: ABM

Sumber: Output SPSS

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi berganda berikut:

$$\text{Alokasi_Belanja_Modal} = 3,051 - 0,335\text{KD} - 0,274\text{KK} + 0,200\text{EPAD}$$

Model persamaan regresi tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta 3,051 artinya apabila variabel kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD bernilai nol, maka alokasi belanja modal adalah sebesar 3,051.
2. Variabel kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien Beta sebesar -0,335, artinya setiap

pertambahan 1% variabel kemandirian daerah akan menurunkan alokasi belanja modal sebesar -0,335.

3. Variabel ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien sebesar -0,274, artinya setiap pertambahan 1% variabel ketergantungan keuangan akan menurunkan alokasi belanja modal sebesar -0,274.
4. Variabel efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,200, artinya setiap pertumbuhan 1% variabel efektivitas PAD akan menaikkan alokasi belanja modal sebesar 0,200.

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah ($-1,1443 < 1,672$) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota D.I Yogyakarta di mana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Nilai *Sig* $0,156 > 0,05$, dan memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* -0,335 sehingga arahnya negatif. Dengan demikian menolak H1. Variabel ketergantungan keuangan ($-1,082 < 1,672$) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta di mana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Nilai *Sig* $0,284 > 0,05$, dan memiliki nilai *Standardized Coefficient Beta* -0,274 sehingga arahnya negatif. Dengan demikian menolak H2. Variabel efektivitas PAD ($1,320 < 1,672$) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta di mana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Nilai *Sig* $0,192 > 0,05$, dan memiliki nilai *Standardized Coefficients Beta* 0,200 sehingga arahnya positif. Dengan demikian menolak H3.

b. Hasil Uji Hipotesis Persamaan 2

1) Uji Kecocokan Model atau Koefisien Determinasi

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,497 ^a	,247	,192	4,2929057

a. Predictors: (Constant), ABM, KD, EPAD, KK

b. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa koefisien determinasi ditunjukkan dari nilai adjusted R² sebesar 0,192 hal ini berarti 19,2% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, dan alokasi belanja modal. Sedangkan sisanya (100%-19,2%=80,8%) dijelaskan oleh variasi lain yang tidak diteliti.

2) Uji t

Tabel 4.15
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26,231	14,088		1,862	,068
KD	-,088	,090	-,258	-,985	,329
KK	-,088	,116	-,223	-,761	,450
EPAD	-,095	,041	-,345	-2,325	,024
ABM	,428	,130	,394	3,300	,002

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 4.15 di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan_Ekonomi (1)} = 26,231 + 0,394\text{ABM}$$

$$\text{Pertumbuhan_Ekonomi (2)} = 26,231 - 0,258\text{KD} - 0,223\text{KK} - 0,345\text{EPAD} + 0,394\text{ABM}$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

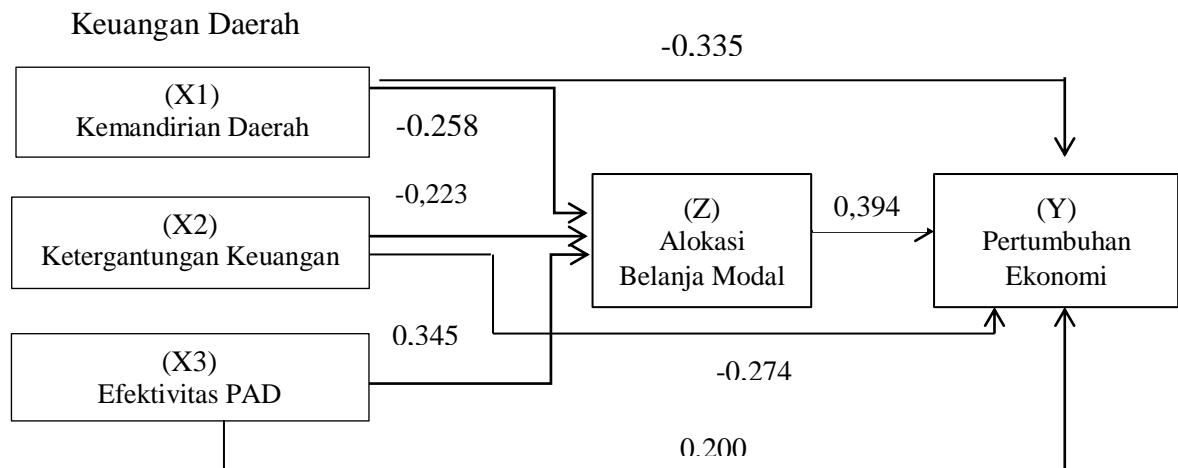
1. Nilai konstanta sebesar 26,231 artinya apabila nilai variabel alokasi belanja modal, kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 26,231.
2. Variabel alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien beta sebesar 0,394 yang artinya bahwa setiap pertambahan 1% variabel alokasi belanja modal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,394.
3. Variabel kemandirian daerah yang dimediasi oleh alokasi belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -0,652 (-0,258KD + 0,394ABM), artinya setiap pertambahan 1% variabel kemandirian daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,652.
4. Variabel ketergantungan keuangan yang dimediasi oleh alokasi belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,617 (-0,223KK + 0,394ABM), artinya setiap pertambahan

1% variabel ketergantungan keuangan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,617.

5. Variabel efektivitas PAD yang dimediasi oleh alokasi belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,739 ($0,345EPAD + 0,394ABM$), artinya setiap pertumbuhan 1% variabel efektivitas PAD akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,739.

Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa variabel alokasi belanja modal ($3,300 > 1,673$) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai Sig $0,002 < 0,05$ dan memiliki *Standardized Coefficients Beta* 0,394 sehingga arahnya positif. Dengan demikian menerima H4. Kemandirian daerah dengan dimediasi oleh alokasi belanja modal ($-0,985 < 1,673$) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta dimana nilai Sig $0,329 > 0,05$ serta *Standardized Coefficient Beta* sebesar -0,258 sehingga arahnya negatif. Dengan demikian menolak H5. Ketergantungan keuangan yang dimediasi oleh alokasi belanja modal ($-0,761 < 1,673$) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di mana nilai Sig 0,450 dan *Standardized Coefficients Beta* -0,223 sehingga arahnya negatif. Dengan demikian menolak H6. Efektivitas PAD yang dimediasi oleh alokasi belanja modal ($-2,325 > 1,673$) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig $0,024 < 0,05$ dan *Standardized*

Coefficients Beta -0,394 sehingga arahnya negatif. Dengan demikian menolak H7.



Gambar 4.1 Persamaan Model Penelitian

C. Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah, ketergantungan keuangan dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD dengan dimediasi oleh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota D.I. Yogyakarta.

Tabel 4.16
Hasil Penelitian

No.	Hipotesis	Keterangan
1.	H1: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.	Ditolak
2.	H2: Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.	Ditolak
3.	H3: Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.	Ditolak
4.	H4: Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	Diterima
5.	H5: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi.	Ditolak

6.	H6: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara ketergantungan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.	Ditolak
7.	H7: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi.	Ditolak

Sumber: Data yang diolah

1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

H1: *Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 dimana nilai signifikan pada $0,156 > 0,05$ dan nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan $-0,335$. Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian **Hipotesis 1 tidak didukung**. Halim (2007) menyatakan bahwa kemandirian daerah adalah sejauh mana pemerintah mampu membiayai sendiri kebutuhan pemerintahannya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dalam pemenuhan PAD masih kalah besar jumlahnya jika dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. Artinya pemerintah daerah belum bisa mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penggalan potensi-potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari penetapan target PAD yang terbilang masih kecil, jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Tingkat kemandirian yang rendah tersebut kurang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil temuan pada penelitian ini berhasil mendukung penelitian dari Arsa dan Setiawina (2015), yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak

berpengaruh terhadap alokasi belanja. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardhini dan Handayani (2011) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sekaligus menolak penelitian dari Sularso dan Restianto (2011), yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

2. Pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

H2: *Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 di mana nilai signifikansi pada $0,284 > 0,05$, dan nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan $-0,274$. Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap rasio alokasi belanja modal. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa **Hipotesis 2 tidak didukung**. Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan menunjukkan pemerintah daerah semakin bergantung terhadap bantuan dari pusat sehingga daerah tidak mandiri. Sebagai konsekuensi adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah leluasa dalam menggunakan dana transfer yang dapat dikatakan pemberiannya cukup signifikan. Tingginya tingkat pendanaan dana perimbangan menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun dengan transfer yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan naiknya alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta karena belanja

daerah alokasi terbesarnya adalah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Gerungan (2015) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara hasil pengujian ini menolak hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011), yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

3. Pengaruh Efektivitas PAD terhadap alokasi Belanja Modal

H3: *Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah efektivitas PAD memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 di mana nilai signifikan pada $0,192 > 0,05$, dan nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan 0,200. Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 3 tidak didukung**. Menurut Nugroho (2010) peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kondisi ini bisa disebabkan karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat cenderung diabaikan, sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif (Martini dan Dwirandra, 2015). Proporsi belanja modal masih kalah dengan belanja pegawai dan barang dan jasa. Hasil temuan ini berhasil mendukung penelitian Martini dan Dwirandra (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Sementara menolak hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) dan Utomo (2012), yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal.

2. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H4: *Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 di mana nilai signifikan pada $0,002 < 0,05$, dan nilai *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan angka sebesar 0,394. Alokasi belanja berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 4 didukung**. Alokasi belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki arti bahwa dalam penelitian ini porsi belanja modal dipergunakan dengan semestinya untuk membangun sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Suwandi dan Tahar (2015), yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Arsa dan Setiawina (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh signifikan positif pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Bose, 2007).

3. Alokasi Belanja Modal Memediasi Hubungan antara Kemandirian Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

H5: *Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi alokasi belanja modal. Berdasarkan perhitungan tabel 4.15 di mana nilai signifikan pada $0,329 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 5 tidak didukung**. Dari hasil penelitian ini kemandirian daerah masih tergolong rendah, namun sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya walaupun tidak signifikan. Karena pemerintah daerah tingkat kemandiriannya masih rendah, dana untuk pemenuhan alokasi belanja modal bergantung dari transfer pemerintah pusat. Alokasi belanja modal di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta tahun 2003-2014 mengalami peningkatan dan penurunan yang drastis, sehingga nilai PDRB juga mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukarmi dan Budiasih (2016), yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal tidak memediasi pengaruh antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Arsa dan Setiawina (2015), alokasi belanja modal tidak memediasi pengaruh kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta menolak penelitian Sularso dan Restianto (2011) alokasi kemandirian daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi oleh alokasi belanja modal.

4. Alokasi Belanja Modal Memediasi Hubungan antara Ketergantungan Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi

H6: *Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara ketergantungan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah ketergantungan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi alokasi belanja modal. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 nilai signifikan $0,450 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal tidak memediasi hubungan antara ketergantungan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 6 tidak didukung**. Alokasi belanja modal tidak memediasi hubungan ketergantungan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dimungkinkan karena penggunaan dana perimbangan dalam alokasi belanja modal masih relatif kecil, sebagian besar dana perimbangan masih digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Padahal faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah alokasi belanja modal. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pemerintah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian dari Prihastuti (2015), alokasi belanja modal tidak memediasi hubungan antara ketergantungan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menolak hasil temuan Sularso dan Restianto (2011), yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal itu Arsa dan setiawina (2015), bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimediasi oleh alokasi belanja modal.

5. Alokasi Belanja Modal Memediasi Hubungan antara Efektivitas PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

H7: *Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi.*

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi alokasi belanja modal. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.15 besar nilai signifikan pada $0,024 < 0,05$ dengan nilai Standardized Coefficient Beta $-0,345$ sehingga arah pengaruh negatif, maka dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis 7 tidak didukung**. Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara efektivitas PAD dan pertumbuhan ekonomi dengan arah negatif. Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa pendapatan sendiri (PAD) tidak berasosiasi positif terhadap alokasi belanja modal. Argumen dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa secara teoritis pendapatan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Namun untuk kasus ini presentase PAD pemerintah daerah di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta hanya sebesar 12% dari total penerimaan daerah. Jumlah tersebut tergolong rendah jika digunakan untuk pengalokasian belanja modal. Sehingga peningkatan belanja modal pada penelitian ini bukan berasal dari dana PAD. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian Abdullah dan Halim (2006) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berasosiasi positif terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik.

